

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdillah, Mujiyono. 2001. *Agama Ramah Lingkungan Perspektif al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina.
- Astawa, I Gede Pantja. 2008. *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*. Bandung: PT. Alumni.
- Anggraini, Jum. 2012. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Djazuli, H. A. 2003. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Jakarta: Kencana..
- Djazuli, H. A. 2007. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Kencana.
- Fatoni, Abdurrahman. 2006. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rinekha Cipta.
- Fendri, Azmi. 2016. *Pengaturan Kewenangan Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Mineral Dan Batubara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*. Pustaka Pelajar.
- Furchan, Arif. 1992. *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Hardjasoemantri, Koenadi. 2006. *Hukum Tata Lingkungan*, cet. 19 Yogyakarta: UGM Press

- Helmi. 2012. *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Iqbal, Muhammad. 2000. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Iqbal, Muhammad. 2014. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Iqbal, Muhammad. 2014. *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana.
- Ichsan, Muchammad. 2015. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Gramasurya, cetakan pertama.
- Karim. 2003. *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Lexy, Moleong J. 2008. *Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Musa, M. Yusuf. 2006. *Politik dan Negara Islam dalam Islam*. Surabaya : Al-Ikhlas.
- Ridwan H.R, 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ridwan. 2004. *Statistika Untuk Lembaga dan Instansi Pemerintah/Swasta*. Bandung: Alfabeta.
- Syarif, Mujar Ibnu., dan Khamami Zada. 2008. *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Gelora Aksara Pratama.
- Sutedi, Adrian. 2011. *Hukum Pertambangan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sutedi, Adrian. 2015. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.

Soeroso, R. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sutedi, Andrian . 2010. *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Sinar Grafika.

Supramono, Gatot. 2012. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.

Salim. 2005. *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Suparyogo, Imam. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Saleng, Abrar. 2004. *Hukum Pertambangan*. Yogyakarta: UII Press.

PENELITIAN ILMIAH

Aprilia. 2020. Skripsi: *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Peratin Dalam Menertibkan Penambangan Batu Sungai Di Pinggir Bendungan Desa*. Lampung: UIN Raden Intan Lampung.

Cholili, Achmad. 2013. *Urgensi dan Relevansi Al-Maslahah Al-Mursalah Sebagai Metode Ijtihad Kontemporer*, At-Taahdzib Vol. 1 No. 2, STAI At-Taahdzib Jombang.

Djatmiati, Tatiek Sri. 2004. Disertasi: *Prinsip Izin Usaha Industri Di Indonesia*. Surabaya: UNAIR.

- Hidayat, Deni. 2020. Skripsi: *Analisis Fqih Siyasah Terhadap Kewenangan Perizinan Pertambangan Mineral Dan Batubara Oleh Pemerintah Daerah*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Heri W., Prastu & Agus Machfud F. *Perlawanan Masyarakat Desa dan Pemerintah Kabupaten Dalam Rencana Tambang Emas Trenggalek*, Universitas Negeri Surabaya.
- Hartati. 2012. *Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara I*, Masalah Hukum Vol. 41 No. 4.
- Indrawati. 2021. Skripsi: *Pertambangan Batu Marmer Di Desa Gamping Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung (Tinjauan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dan Fiqih Lingkungan)*. Tulungagung: UIN Tulungagung.
- Junisa, Friskila dan Dientje Rumimpunu. 2020. Sara Roeroe, Skripsi: *Efektivitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral di Indonesia*, Universitas Sam Ratulangi, Manado, Sulawesi Utara, Junisa, Friskilia B.D., et. All., 2002. *Efektivitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral di Indonesia*, e-journal Vol. 10 No. 3.
- Mukti, Alan. 2021. Skripsi: *Tinjauan Yuridis dan Siyasah Dusturiyah Atas Desentralisasi Kewenangan Pengelolaan Pertambangan*, IAIN Bengkulu.

- Nuryanti, Dati. 2016. Skripsi : *Sejarah Hukum Pertambangan, Kewenangan Pemerintahan Daerah dan Izin Usaha Pertambangan*. Bandung: UNPAS.
- Nurhasna. 2022. Skripsi: *Pemberlakuan UU Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Tinjauan Konsep Otonomi Daerah dan Fiqh Siyasah*, IAIN Batusangkar.
- Prapti, Derita dan Faisal. 2021. *Politik Hukum Kewenangan Perizinan Pertambangan Pasca Perubahan Undang-Undang Minerba*, Jurnal Pandecta, Vol. 16 No. 1, Universitas Bangka Belitung.
- Purnama, Rezki Samad dan Yunus Wahid, Hamzah Halim. 2021. *Urgensi Partisipasi Masyarakat Terhadap Izin Usaha Pertambangan Pasir*, Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 24 No. 1.
- Pusputa, Nita. 2021. Skripsi: *Praktik Pengurusan Izin Usaha Tambang Pasir Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Pemilik Izin Usaha Tambang Pasir Di Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara)*.
- Riqiey, Baharuddin dan Pandu Satriawan Zainulla. 2022. *Problematika Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Tambang*, Jurnal Sosialita, Vol. 1, No. 1. Surabaya: Universitas 17 Agustus 1945.
- Rachma, Dida dan Nur Rahmadayana. 2020. *Wilayah Pertambangan Pasca Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Meja Yang Akan Datang*, Jurnal Paradigma Multidisipliner Mahasiswa Pascasarjana, No. 1 Vo. 1, hal. 5.

Su'adah, Yustafa Badrus. 2015. *Fungsi Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Pertambangan di Kabupaten Trenggalek Tahun 2015*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Administrasi Negara, No. 2 Vol. 1.

Syarifudin, Ateng. *Perizinan Untuk Berbagai Kegiatan*, makalah tidak dipublikasikan, dikutip dari M. Panca Kurniawan, Skripsi: *Kewenangan Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) Kota Bandar Lampung Dalam Mengeluarkan Izin di Bidang Kepariwisata*, universitas Lampung.

Satoto, Sukanto dan Bahder Johan Nasution. 2019. *Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara Untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*, Jurnal Sains Sosio Huaniora Vol. 3, No. 1, Juni 2019. Jambi: Universitas Jambi.

PERATURANAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 Tentang
Pedoman Organisasi dan tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di
Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012-2032.

Al-Qur'an

QS. Al-Baqarah ayat 22

QS. Asy-Syu'ara: 183.

WAWANCARA

Wawancara dengan Edi, tanggal 07 Juni 2023 di Kantor Desa Karang.

Wawancara Supandi, tanggal 10 Juni 2023 di desa Suruh.

Wawancara dengan Mustakirin, tanggal 24 Mei 2023, di Alun-alun Trenggalek.

Wawancara dengan Suyanto, tanggal 10 Juni 2023 di desa Sumberbening.

Wawancara dengan Siti Zaenah, tanggal 08 Juni 2023, di Desa Karang.

Wawancara dengan Sriati, tanggal 08 Juni 2023 di Desa Karang.

Wawancara dengan Purwadi, tanggal 08 Juni 2023, di Kantor Desa Kampak.

Wawancara dengan Yustafa, tanggal 07 Juni 2023 di Kantor Pemerintah Daerah
Trenggalek.

WEBSITE

Asnawi. (2023, 27 Mei). *Menyoal Izin Tambang Emas di Trenggalek*, dalam <https://www.mongabay.co.id/2021/04/29/menyoal-izin-tambang-emas-di-trenggalek-2/>, diakses pada 04 Juli 2023. HMT ITB, *Revisi UU Minerba*, dalam <https://hmt.mining.itb.ac.id/revisi-uu-minerba/>.

Asnawi, *Bupati Trenggalek Siap Pasang Badan Tolak Tambang Emas*, (2023, 09 Juli). dalam <https://www.mongabay.co.id/2021/09/23/bupati-trenggalek-siap-pasang-badan-tolak-tambang-emas/>.

Argawati, Utami.. *Pemerintah: Perubahan UU Minerba Untuk Perbaiki Sektor Pertambangan*, dalam <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17910>.

Bahan galian golongan C (Bahan Galian Industri) merupakan bahan galian yang digunakan untuk industry dan tidak ada di bahan galian A dan B, contohnya kapur, pasir, marmer. Dalam https://roboguru.ruangguru.com/forum/menurut-undang-undang-no-11-tahun-1976-tentang-pertambangan-bahan-galian-golongan_FRM-D7HX60EA, diakses pada 28 April 2023.

CNN Indonesia, *Revisi UU Minerba Sah, Pengusaha Mau Perpanjang Tambang*. (2023, 02 Agustus). dalam <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200514191005-85-503516/revisi-uu-minerba-sah-pengusaha-mau-perpanjang-izin-tambang>.

Dalam <https://kec-cigugur.kuningankab.go.id/perizinan-dpmpmsp/#:~:text=Pengertian%20Perizinan%20adalah%20merupakan%2>

[Opemberian,izin%20maupun%20tanda%20daftar%20usaha.](#), diakses pada 19 Juni 2023.

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. (2023, 02 Agustus). *Perizinan Pertambangan*, dalam <https://desdm.ntbprov.go.id/page/perijinan-tambang.html>.

Erika, *Wawancara Adalah: Pengertian, Jenis, Fungsi, Tahap, dan Tips*, dalam <https://info.populix.co/articles/wawancara-adalah/>, diakses pada 02 Maret 2023.

Fadil, Muhammad Rizal. (2023, 28 April). *Izin Usaha Pertambangan*, dalam https://www.researchgate.net/profile/Muhammad-Rizal-Fadil/publication/336878308_IZIN_USAHA_PERTAMBANGAN.

Fadil, Muhammad Rizal. (2023, 04 Juli). *Izin Usaha Pertambangan*, Universitas Sriwijaya, 2019, dalam https://www.researchgate.net/profile/Muhammad-Rizal-Fadil/publication/336878308_IZIN_USAHA_PERTAMBANGAN_-_Muhammad_Rizal_Fadil/links/5db83cb5299bf1a47bfbdeb4/IZIN-USAHA-PERTAMBANGAN-Muhammad-Rizal-Fadil.pdf.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2023, 16 Juni). dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/izin>.

K3 Pertambangan PT. Sumber Mineral Nusantara. (2023, 12 Mei). dalam <https://www.ptsmn.id/keberlanjutan/k3l>.

- Kar. (2023, 29 Februari). *Tumpang Tindih Izin Pertambangan Masih Terjadi*, dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/tumpang-tindih-izin-pertambangan-masih-terjadi-lt52f8a7883a835/>.
- Nano, Verda S., (2023, 28 April). *Bukan di ESDM, Ini Alasan Pencabutan Izin Tambang Ada di BKPM*, dalam <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220331193048-4-327778/bukan-di-esdm-ini-alasan-pencabutan-izin-tambang-ada-di-bkpm>.
- Portal Kecamatan Karang. (2023, 04 April). *Trenggalek menolak Tambang Emas*, dalam <https://kec-karangan.trenggalek>.
- PT Sumber Mineral Nusantara, (2023, 12 Mei). dalam <https://www.ptsmn.id/>.
- Persamaan dan Perbedaan AMDAL, UKL, UPL & SPPL. (2023, 20 Mei). dalam <https://environment-indonesia.com/apa-itu-amdal-ukl-upl-dan-sppl/>.
- Prospek PT. Sumber Mineral Nusantara. (2023, 12 Mei). dalam <https://www.ptsmn.id/tentang-perusahaan/prospek-perusahaan>.
- Perizinan Penggunaan Kawasan Hutan (2023, 20 Mei). dalam <https://dlhk.jogjaprovo.go.id/perizinan-penggunaan-kawasan-hutan>.
- Pranata, Nika. (2023, 28 Februari) *Kutukan Negara Kaya Sumber Daya Alam*, dalam <http://lipi.go.id/lipimedia/kutukan-negara-kaya-sumber-daya-alam/10382>.
- Smartlegal, *Ini Syarat Untuk Memiliki Izin Usaha Pertambangan Tahap Eksplorasi*, (2023, 02 Agustus). dalam

<https://smartlegal.id/perizinan/2021/11/05/ini-syarat-untuk-memiliki-izin-usaha-pertambangan-tahap-eksplorasi/>.

Syura adalah memaparkan, mengutarakan sesuatu atau mengambil sesuatu.

Muhammad Nur Ichwan Muslim, *Syura Dalam Pandangan Islam dan Demokrasi*, (2023, 31 Juli). dalam <https://muslim.or.id/6055-syura-dalam-pandangan-islam-dan-demokrasi.html>.

Sejarah PT. Sumber Mineral Nusantara, (2023, 12 Mei). dalam

<https://www.ptsmn.id/tentang-perusahaan/sejarah-perusahaan>.

Tata Kelola PT. Sumber Mineral Nusantara. (2023, 12 Mei). dalam

<https://www.ptsmn.id/keberlanjutan/tata-kelola>.

Undang-Undang Minerba Dan Pengaruh Terhadap Pertambangan Indonesia.

(2023, 02 Mei). dalam <https://www.dslalawfirm.com/undang-undang-minerba/>.

Upaya Preventif dan Represif Dalam Penegakan Hukum. (2023, 28 April). dalam

<https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-dan-represif-dalam-penegakan-hukum-lt63e0813b74769?page=all>.

Ulasan PT. Sumber Mineral Nusantara. (2023, 12 Mei). dalam

<https://www.ptsmn.id/tentang-perusahaan/ulasan-perusahaan>.

Wahyu. (2023, 15 Juli). *Kronologi Aktivitas Tambang Emas di Trenggalek: Versi*

Studi AMDAL PT SMN, dalam <https://nggalek.co/2021/03/13/kronologi-aktivitas-tambang-emas-di-trenggalek-versi-studi-amdal-pt-smn/>.

Yurika. (2023, 28 Februari). *Tolak Tambang Emas PT SMN, Warga Trenggalek Geruduk KESDM, KLHK,ATR/BPN*, dalam <https://www.dunia-energi.com/tolak-tambang-emas-pt-smn-warga-trenggalek-geruduk-kesdm-klhk-atr-bpn/>.

Yuana, Lely. (2023, 04 April). *Pemprov Jatim Sebut PT SMN Belum Punya Hak Eksplorasi*, dalam <https://timesindonesia.co.id/amp>.